BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta karya film sebagai bukti bahwa aturan hukum menjamin hak-hak ekonomi yang dimiliki secara sah oleh pemilik hak cipta setelah terjadinya peralihan hak melalui perjanjian tertulis dengan melindunginya dari perbuatan yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.
2. Rumah produksi yang menjadi pemilik hak cipta karya film dapat memilih untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh upaya litigasi dan/atau non-litigasi. Apabila memilih menggunakan upaya litigasi, maka rumah produksi dapat mengajukan gugatan ganti kerugian yang ditujukan pada ketua pengadilan niaga yang berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Namun, di sisi lain pemilik hak cipta dapat memilih untuk menggunakan upaya non-litigasi dengan memilih salah satu dari ke-3 APS yang tersedia bagi masalah pelanggaran hak cipta, yaitu mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Pemilik hak cipta juga dapat mengajukan laporan terjadinya

pelanggaran hak cipta secara elektronik pada laman resmi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun laman resmi pengaduan milik Kominfo dengan disertai bukti pendukung yang kuat agar lulus tahap verifikasi.

1.2 Saran

1. Pemilik hak cipta tidak boleh merasa abai ketika hak nya telah dilanggar, sudah seharusnya pemilik hak cipta mengambil langkah serius terhadap pelanggaran hak yang dialaminya, baik dengan memutuskan untuk menempuh upaya litigasi atau upaya non-litigasi dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta dan memulihkan kerugian yang diderita. Hal ini dilakukan tentunya untuk memperjuangkan hak nya sendiri.
2. Pemerintah dalam hal ini Menkumham melalui DJKI dan Kominfo perlu lebih aktif dalam bekerjasama melakukan kampanye edukasi terkait hak cipta terutama karya film, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta film dan kerugian besar yang disebabkan, serta memperkenalkan *platform streaming* film legal dan menghindari menonton melalui situs ilegal di internet. kampanye ini dapat dilakukan secara aktif dan konsisten dengan mendatangi sekolah, universitas, maupun balai desa dan/atau kantor kelurahan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep hak cipta dan pelanggarannya. Pemerintah juga dapat menggunakan media

sosial melalui postingan yang diunggah maupun bekerjasama dengan konten kreator dalam proses edukasi karena akan menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas lagi. Selain itu, pemerintah mungkin dapat bekerjasama dengan *platform* legal untuk menurunkan nominal harga untuk berlangganan dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat agar tidak terlalu membebankan dan dapat menghindari aktivitas menonton melalui situs-situs ilegal di internet.